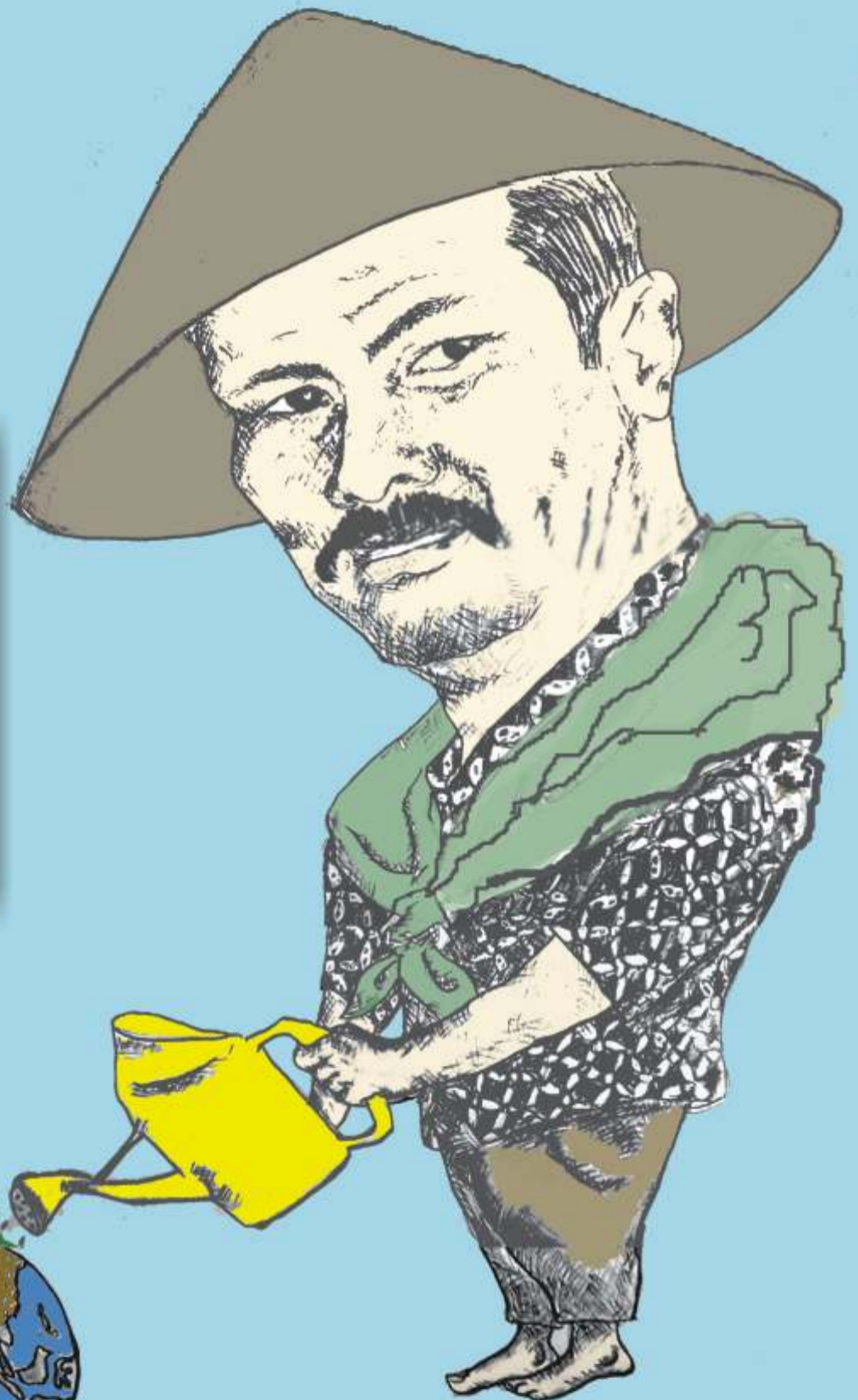


PEMBARUAN TANI

MIMBAR KOMUNIKASI PETANI

PETANI

Menyelamatkan Bumi



Tegakkan keadilan untuk atasi pemanasan global

Banyak yang menganalisis bahwa pemanasan global adalah penyebab banjir, kekeringan, atau kelaparan yang mengancam planet dan umat manusia saat ini. Hal itu jelas salah kaprah, karena pemanasan global bukanlah fenomena baru, bukan pula fenomena yang terjadi tiba-tiba dari langit (given atau taken for granted). Jika dianalisis secara mendalam, pemanasan global sesungguhnya bukanlah sebab, ia adalah akibat. Ia adalah akibat dari mode produksi kapitalistik.

Mode produksi kapitalistik inilah yang seharusnya dianalisis lebih lanjut sebagai permasalahan utama yang menyebabkan pemanasan global. Analisis terhadap penyebab pemanasan global ini juga harus dilakukan secara holistik, tidak sektoral seperti saat ini yang cenderung mengambil sudut pandang lingkungan saja. Karena sesungguhnya di sektor agraria (bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya) seperti pertanian, perikanan, pertambangan dan industri secara historis telah dieksploitasi dengan praktek-praktek kapitalistik. Jadi sesungguhnya perusakan lingkungan tak hanya dilakukan akhir-akhir saja, tapi sesungguhnya adalah rangkaian sejarah panjang penindasan mulai dari era kolonial.

Namun adalah sangat logis jika dinyatakan kontribusi pemanasan global mulai sangat marak dari era neoliberal (1944 hingga sekarang). Mengutip perkataan presiden pertama RI Soekarno, era penjajahan gaya baru inilah yang ditandai mode produksi yang mengerikan: asap-asap pabrik yang mengepul menghitamkan udara, jutaan hektar tanah yang dirangsek untuk perkebunan raksasa, gedung yang mencakarcakar langit, dan masifnya hutan yang dibabat. Kesemuanya bertujuan tunggal, demi laba sebesar-besarnya.

Mode produksi ini tak kenal puas, tak kenal batas untuk tumbuh. Dan kita bisa lihat hasilnya, angka-angka yang hanya dinikmati segelintir perusahaan raksasa, negara miskin dan berkembang maju, lembaga keuangan internasional dan tentunya individu-individu pemilik kapital.

Selama beberapa dekade neoliberalisme diejawantahkan model pembangunan global, dan selama itu pulalah proses pemanasan global sebenarnya telah diakselerasikan. Ada beberapa jalan neoliberalisme secara kebijakan dan praktek, namun secara singkat bisa kita mengerti dari kredo Konsensus Washington yakni (1) privatisasi; (2) deregulasi; dan (3) liberalisasi pasar.

Keadilan sosio-ekologis

Implikasi secara umum dari pemaparan di atas bisa kita lihat sebagai berikut: 2.8 miliar rakyat masih hidup dengan pendapatan di bawah 2

USD per hari dan malah 1.2 miliar rakyat masih hidup dengan pendapatan kurang dari 1 USD per hari. Di sisi kontras yang lain, Pemerintah Uni Eropa telah memberikan subsidi bagi rakyatnya sebesar 2 USD per hari (Bank Dunia, 2000; FAO, 1999). Jutaan rakyat tidak memiliki akses terhadap energi di negara miskin dan berkembang (hemisfer selatan bumi), sedang rakyat di negara maju (hemisfer utara bumi) melampaui batas penggunaan energi dan bergaya hidup yang boros.

Sekitar 854 juta orang masih menderita karena kelaparan (La Via Campesina, 2006). Juga 85 persen share dari GDP secara global dikuasai oleh 15 persen jumlah rakyat di seluruh dunia, sementara sisanya hanya mengais remah-remah dari model pembangunan saat ini. Dari jumlah sisa 15 persen GDP secara global itu, secara total diperebutkan oleh 5.355 miliar rakyat di seluruh dunia. Dampaknya terlihat jelas dari pemetaan tersebut, yakni terjadi yang dinamakan ketidakadilan sosial di muka bumi ini.

Contoh ketimpangan adalah Amerika. Satu dekade terakhir, konsumsi energi Amerika naik menjadi 2,7 juta barel per hari, lebih banyak daripada yang dikonsumsi India dan Pakistan sekaligus, yang keduanya berisi total empat kali lipat penduduk Amerika. Secara total, rata-rata orang Amerika mengkonsumsi lima kali lebih banyak energi daripada rata-rata warga dunia, 10 kali lebih banyak daripada rata-rata orang Cina, dan 20 kali lebih banyak daripada rata-rata orang India. Pada 1990, total emisi gas rumah kaca mencapai 13,7 Gt (gigaton), yang secara berturut-turut disumbang Amerika (36,1 persen), Rusia (17,4 persen), Jepang (8,5 persen), Jerman (7,4 persen), Inggris (4,2 persen), Kanada (3,3 persen), Italia (3,1 persen), Polandia (3 persen), Prancis (2,7 persen), dan Australia (2,1 persen). keuangan internasional dan TNCs penyebab terbesar pemanasan global justru paling siap menghadapi resiko dan sulit mengubah gaya hidupnya.

Pemanasan global merupakan hasil persamaan yang kompleks dari gagalnya model pembangunan yang berkarakteristik neoliberal. Oleh karena itu setiap upaya untuk menghindari dan memerangi pemanasan global juga tidak sederhana. Melihat kembali persoalan hubungan antar negara, pemilik kapital (utamanya TNCs), lembaga keuangan internasional, rejim perdagangan bebas dunia dan tentu saja rakyat harus dilakukan segera. Struktur penindasan yang terjadi secara historis berabad-abad lamanya dan bertransformasi menjadi penjajahan gaya baru (neokolonialisme-imperialisme) cenderung melanggengkan ketidakadilan sosial yang masih terus menerus terjadi.

DAFTAR ISI

Henry Saragih dinobatkan Guardian sebagai 50 orang yang bisa menyelamatkan bumi 3

Petani menyelamatkan bumi 4

Aksi serempak organisasi rakyat di 94 negara 6

Kedaulatan pangan jalan keluar krisis pangan 8

Tinjauan gerakan rakyat terhadap rencana kerja Bali 10



Penanggung Jawab: Henry Saragih
Pemimpin Umum: Zaenal Arifin Fuad
Pemimpin Redaksi: Achmad Ya'kub;
Dewan Redaksi: Ali Fahmi, Agus Rully, Tejo Pramono, M Haris Putra, Indra Lubis, Irma Yani;
Redaktur Pelaksana: Cecep Risnandar
Redaktur: Muhammad Ikhwan, Tita Riana Zen, Wilda Tarigan, Syahroni;
Reporter: Elisha Kartini Samon, Susan Lusiana (Jakarta), Tyas Budi Utami (Jambi), Harry Mubarak (Jawa Barat),

Muhammad Husin (Sumatera Selatan), Marselinus Moe (NTT).
Sekretaris Redaksi: Tita Riana Zen
Keuangan: Sriwahyuni
Sirkulasi: Supriyanto, Gunawan;
Penerbit: Serikat Petani Indonesia (SPI)

Alamat Redaksi: Jl. Mampang Prapatan XIV No.5 Jakarta Selatan 12790. Telp: +62 21 7991890 Fax: +62 21 7993426 Email: pembaruantani@spi.or.id website: www.spi.or.id

Redaksi menerima tulisan, artikel, opini yang berhubungan dengan perjuangan agraria dan pertanian dalam arti luas yang sesuai dengan visi misi Pembaruan Tani. Bila tulisan dimuat akan ada pemberitahuan dari redaksi.

Henry Saragih dinobatkan Guardian sebagai 50 orang yang bisa menyelamatkan bumi

Guardian, harian Inggris terkemuka yang berbasis di London menobatkan Henry Saragih sebagai 50 orang yang bisa menyelamatkan planet dari bencana pemanasan global, yang dirilis dalam laporan Guardian pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2008. Henry, satu-satunya putra Indonesia dalam daftar itu bersanding dengan beberapa tokoh dunia dari berbagai bidang diantaranya, Politisi Amerika Serikat Al Gore, Kanselir Jerman Angela Merkel, aktor Hollywood Leonardo Di Caprio, dll.

Henry terpilih karena sepak terjangnya dalam memperjuangkan pertanian berkelanjutan berbasis keluarga. Penghargaan tersebut tidak terlepas dari peran Henry sebagai Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) yang sekaligus menjadi Koordinator gerakan buruh tani dan petani kecil internasional bernama La Via Campesina. Dalam perannya itu, Henry aktif menentang korporasi pertanian dan agribisnis

besar yang merusak lingkungan.

Dalam keterangan resminya, Guardian menyatakan:

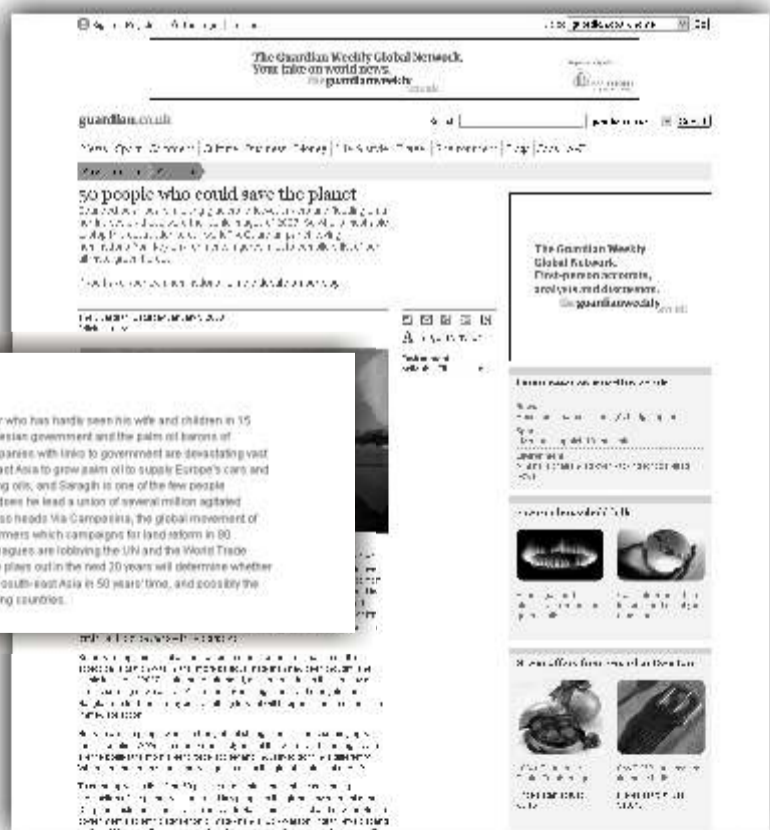
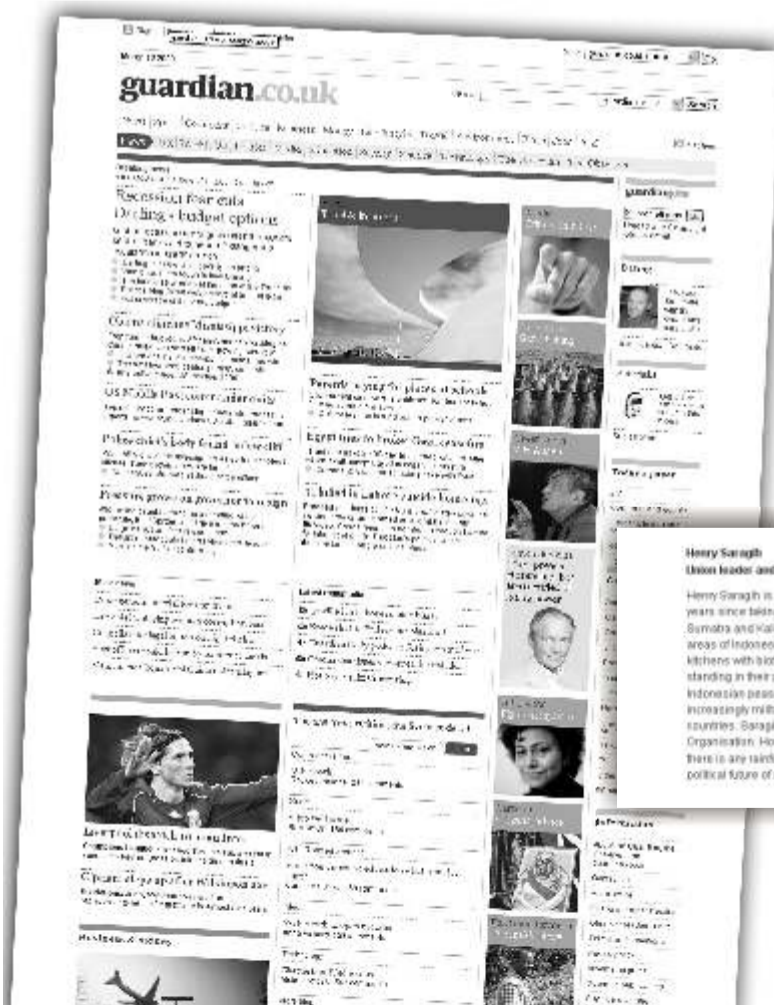
“Henry Saragih, seorang petani kecil yang bahkan sulit untuk menjumpai anak dan istrinya semenjak 15 tahun terakhir berhadapan dengan pemerintah Indonesia dan tuan-tuan tanah perkebunan kelapa sawit di Sumatera dan Kalimantan. Perusahaan-perusahaan yang memiliki kedekatan dengan pemerintah telah menghancurkan kawasan yang sangat luas di Indonesia dan Asia Tenggara untuk perluasan perkebunan kelapa sawit guna memasok kendaraan dan rumah tangga di Eropa dengan biofuel dan minyak goreng. Saragih adalah satu diantara sedikit orang yang menghalangi jalan ini. Dia bukan saja menjadi pemimpin serikat dari beberapa juta petani Indonesia yang gelisah menghadapi ketidakadilan, namun juga merupakan pemimpin Via Campesina, gerakan internasional para petani yang sangat militan dan terus berkembang yang tanpa henti mengkampanyekan land reform di 80 negara.

Saragih dan rekan-rekannya juga terus melakukan lobi-lobi kepada PBB dan Organisasi Perdagangan Internasional (WTO). Bagaimana perjuangan ini terus dilakukan dalam 20 tahun ke depan akan

menentukan kondisi hutan hujan di Asia Tenggara dalam 50 tahun ke depan dan bahkan juga masa depan politik di berbagai negara berkembang.”

Guardian menyaring daftar 50 orang penyelamat planet ini dengan dewan juri yang terdiri dari: mantan ilmuwan Bank Dunia Bob Watson, environmentalis India Vandana Shiva, Biolog peraih Nobel Wangari Maathai, Kolumnis Guardian Monbiot, aktivis Greenpeace Gerd Leipold, politisi Caroline Lucas dan Ken Livingstone, komisi pembangunan berkelanjutan Inggris Jonathan Porritt dan novelis Phillip Pullman. Kemudian nama-nama dari panel juri tersebut diverifikasi oleh reporter dan koresponden Guardian di seluruh dunia dan menghasilkan 50 nama terpilih.

Dalam keterangannya juga, Guardian mengatakan “Ini bukanlah merupakan daftar yang tetap dan tidak ada peringkat dalam daftar ini, namun ke-50 nama tersebut menunjukkan rentang yang luas dari orang-orang yang mewakili revolusi sosial dan ilmiah populer yang menakjubkan dan memberikan harapan bagi kita dalam memasuki tahun 2008 ini”.



Petani menyelamatkan bumi

Gerak Lawan kelompok yang terdiri dari berbagai organisasi rakyat merilis laporan publik pasca KTT PBB tentang perubahan iklim di Bali. Laporan publik tersebut mengambil tema “Petani menyelamatkan bumi” dan dibahas oleh Direktur Walhi Chalid Muhammad, ekonom Ihsanuddin Noorsy dan Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih, yang baru-baru ini mendapat penghargaan 50 orang penyelamat bumi oleh harian Guardian.

Chalid Muhammad menyatakan bahwa publik dan aktivis harus terus menekan pemerintah agar lebih efektif mengatasi masalah pemanasan global. Karena yang paling terkena dampak dari pemanasan global adalah rakyat miskin.

Terhadap hasil KTT, Chalid menilainya skeptis. Salah satu hasil konferensi tersebut yakni mekanisme REDD tidak akan menyelesaikan masalah pemanasan global. Dimana REDD menyerahkan

pengurangan emisi dengan cara mekanisme pasar. Hal itu diadopsi juga oleh pemerintah Indonesia. “Seharusnya pemerintah berani memperjuangkan hak-hak negara dunia ketiga dan menuntut negara-negara anex 1 untuk mengurangi emisi secara fundamental, bukannya terjebak pada perdagangan karbon” jelas Chalid. Menyoal, langkah pemerintah yang akan membentuk komisi perubahan iklim, Chalid menganggap hal tersebut adalah tindakan sia-sia belaka.

Pendapat Chalid diamini oleh Ihsanuddin Noorsy. Pembentukan Komisi Perubahan Iklim tidak efektif dan hanya membebani anggaran negara saja. “Sama halnya dengan 52 komisi negara lainnya, tidak ada yang bisa bekerja secara efektif,” tutur Ihsanuddin. Bahkan ia menyatakan selama ini peran dan kedudukan komisi-komisi negara itu tidak jelas. “Coba tunjukkan kepada saya dimana letak komisi-komisi negara itu dalam tata aturan pemerintahan di Indonesia,” tanya Ihsanuddin.

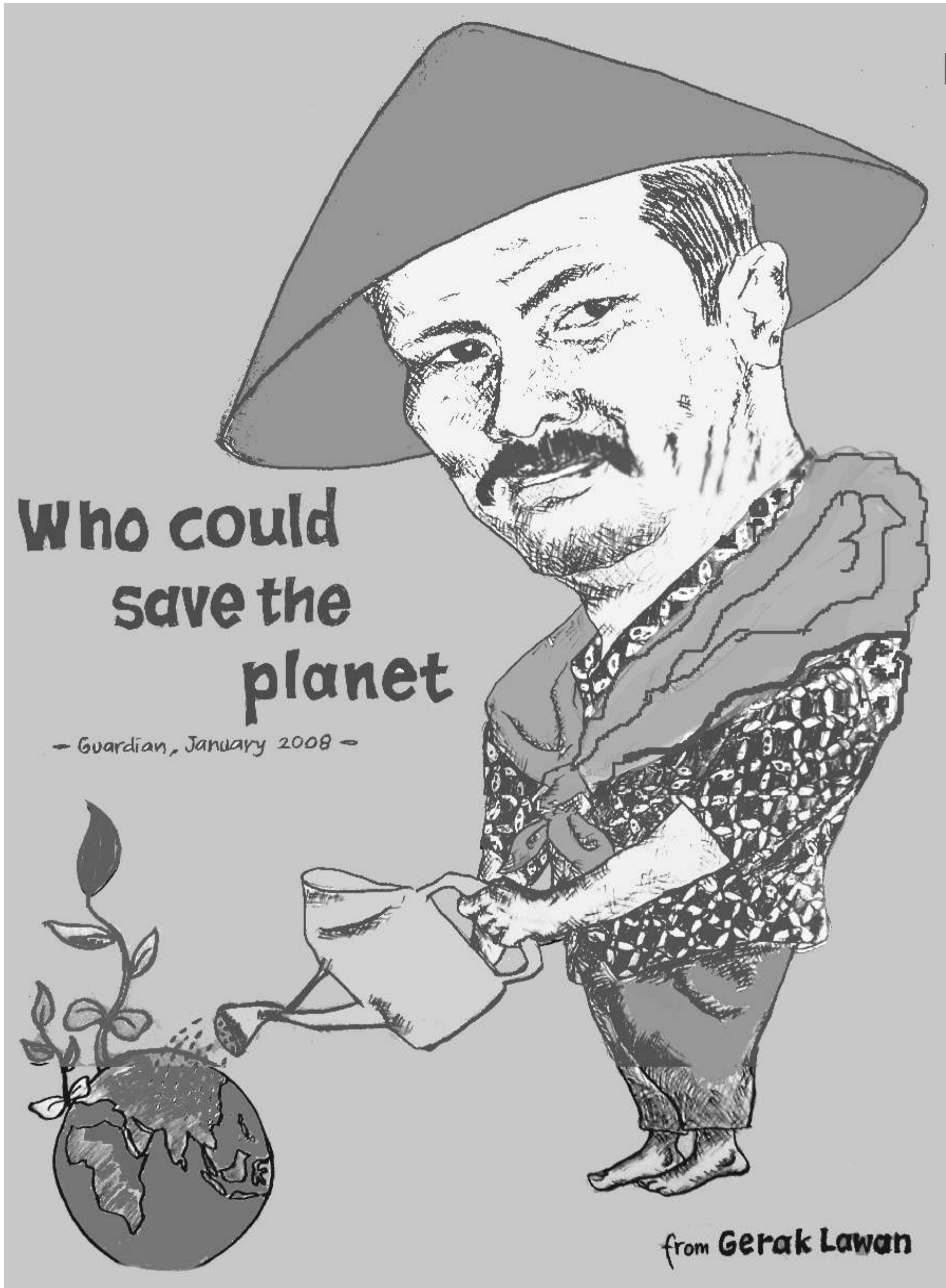
Sementara itu, Ketua Umum SPI

Henry Saragih menyatakan bahwa solusi pemanasan global tidak bisa diserahkan kepada mekanisme pasar. Apabila hal itu terjadi, lingkungan akan mengalami kerusakan yang lebih parah lagi dan rakyat miskin yang akan menanggung akibat paling berat.

“Hal serupa pernah terjadi ketika pada tahun 1996 FAO merancang pengentasan kelaparan. Dalam konsep ketahanan pangan, mekanisme pengentasan kelaparan diserahkan kepada mekanisme pasar. “Hasilnya, sekarang angka kelaparan malah semakin bertambah,” tukas Henry.

Oleh karena itu, untuk melawan pemanasan global hendaknya jangan diserahkan kepada mekanisme pasar juga. Apabila pengurangan emisi dilakukan dengan mekanisme perdagangan karbon hasilnya akan semakin mengkhawatirkan. Terakhir, Henry menegaskan, untuk mengurangi pemanasan global harus ada perubahan moda produksi, dari yang eksploitatif menjadi industri yang berorientasi kepada kepentingan rakyat.





Aksi serempak organisasi rakyat di 94 negara



Organisasi rakyat dan LSM yang tergabung dalam World Social Forum menggelar aksi di 94 negara. Menurut catatan Forum sosial Dunia (WSF), tahun ini ada 691 aksi yang dilakukan serentak. Aksi tersebut merupakan protes WSF terhadap pertemuan Forum Ekonomi Dunia (WEF) yang dihadiri pebisnis-pebisnis dan pemerintah di Davos, Swiss.

Jutaan rakyat dan organisasi mengadakan aksi untuk menunjukkan bahwa masih ada jalan lain, yakni dunia yang berkeadilan sangat mungkin diwujudkan. Dunia tanpa kemiskinan, pengangguran, kebodohan dan ketidaksetaraan. Semangat ini yang diusung oleh gerakan rakyat dalam melawan kebijakan neoliberalisme yang membunuh, dengan kredo Konsensus Washington: privatisasi, liberalisasi, dan deregulasi.

Di Indonesia, aksi digelar di depan Istana Negara yang diikuti oleh elemen organisasi rakyat yang tergabung dalam Gerak Lutan. Lebih dari 700 massa aksi menyerukan kepada pemerintah untuk melawan neoliberalisme dalam segala

bentuknya.

Dalam aksi itu mengemuka delapan tuntutan, diantaranya pembaruan agraria sejati dan mendistribusikan tanah untuk petani, menghentikan impor dan liberalisasi pangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan bangsa, membangun industri nasional yang kuat dan meningkatkan kesejahteraan buruh, menolak privatisasi cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup rakyat banyak, menghapuskan utang lama dan menolak utang baru, mencabut UU Penanaman Modal, memberikan pendidikan dan kesehatan gratis untuk rakyat, mewujudkan keadilan iklim untuk melawan pemanasan global, menegakkan keadilan jender dengan meningkatkan akses dan kontrol perempuan dalam pengambilan keputusan.

“Semangat WSF sesungguhnya merupakan bentuk perlawanan rakyat global terhadap kebijakan dan praktek ekonomi kapitalistik yang dikontrol oleh korporasi-korporasi besar,” ungkap Ketua Umum SPI Henry Saragih.

Global Day Action

WSF secara historis merupakan agenda rakyat, dalam konteks gerakan sosial, untuk menyikapi isu-isu yang mengemuka di dunia. Secara paralel, WSF yang bervisi kerakyatan selalu berhadapan dengan WEF yakni forum para pebisnis. Dengan ini, semangat WSF jelas adalah sebagai antitesis dari kebijakan dan praktek neokolonialisme-imperialisme yang dibahas oleh pemerintah dan ekonom di WEF.

Sudah tujuh kali WSF digelar dari tahun 2001 hingga 2007. Semangat untuk mewujudkan alternatif seperti semboyan “Another World Is Possible” tetap ada, dan praktek-praktek perjuangan rakyat di seluruh dunia menjadi buktinya. Namun WSF sendiri dikritik karena kurang fokus terhadap output riil di tingkatan keseharian, sementara dinamika internal WSF juga semakin beragam. Hal ini mempengaruhi posisi WSF sebagai forum yang cukup kuat sebagai rival kebijakan dan praktek neokolonialisme-imperialisme. Posisi WSF kian tahun kian lemah, sementara laju neokolonialisme-imperialisme makin menggurita, makin ekspansif, makin membunuh rakyat. Kenyataan tak lain disebabkan semangat WSF ‘dikhianati’ oleh peserta-peserta WSF yang makin tidak fokus: ekonom, bahkan organisasi-organisasi yang nyata-nyata tidak membela kepentingan rakyat seperti USAID, Ford Foundation dan NGOs yang menjadi antek-anteknya.

Sebagai evaluasi kritis dari proses tersebut, maka WSF tahun 2008 ditransformasikan menjadi Global Day of Action. WSF tidak lagi dipusatkan menjadi forum yang cair, juga tidak terpusat di sebuah open space pada lokasi tertentu. Kini WSF dilakukan di tiap negara, dengan mengedepankan isu-isu yang riil (dan sesuai dengan

Butuh solusi jangka panjang untuk atasi krisis kedelai

Meningkatnya harga kedelai dalam beberapa bulan terakhir telah membuat rakyat panik. Dalam hal ini, rakyat miskin adalah pihak yang paling terpuak, tahu dan tempe yang selama ini menjadi makanan pengganti daging harganya melambung tinggi. Bagaimana tidak, harga kedelai Januari 2007 telah meningkat lebih dari 200 persen dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya. Hingga saat ini harga kedelai ada di kisaran Rp. 7.800/Kg, ini harga tertinggi sejak 24 tahun terakhir.

Menurut Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih, gejala harga kedelai disebabkan oleh masalah klasik yakni turunnya produksi dalam negeri dan naiknya harga di pasar global. Namun sejauh ini tidak ada pembuat kebijakan yang melihat akar permasalahan mengapa produksi nasional turun dan mengapa harga di tingkat global bisa melambung.

Henry menjelaskan, menurut catatan BPS pada tahun 2006 produksi kedelai nasional mencapai 747.611 ton, pada tahun 2007 turun menjadi 608.263 ton. Di sisi lain, peningkatan impor kedelai naik 6,7 persen setiap tahunnya. Ada banyak penyebab turunnya produksi kedelai nasional diantaranya gagal panen, menciutnya lahan tanaman pangan, dan bencana alam. Namun yang paling vital adalah dikarenakan kebijakan yang keliru.

"Saya masih ingat ketika pada tahun 1999, pemerintah dengan kebijakan pasar bebasnya mulai membuka keran impor kedelai dan menurunkan bea masuk. Saat itu pasar nasional dibanjiri kedelai

impor, akibatnya harga kedelai di tingkat petani tertekan, petani banyak yang merugi, kebijakan tersebut membuat petani hengkang dari budidaya kedelai" papar Henry.

Menurut Henry keadaan seperti ini diperparah dengan kebijakan pembangunan pertanian yang keliru. Pemerintah lebih mengutamakan usaha-usaha agrobisnis perkebunan yang berlahan luas seperti kelapa sawit, disisi lain pembangunan tanaman pangan terbengkalai. Sedangkan infrastruktur irigasi tidak dibangun bahkan yang sudah ada pun tidak dipelihara sehingga kuantitas dan kualitasnya menurun. Sementara itu, jumlah lahan pertanian pangan terus menyusut dan tidak dijalankannya pembaruan agraria. "Hingga saat ini janji pemerintah untuk membagi-bagikan lahan kepada petani melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak ada perwujudannya," tandas Henry.

Atas dasar itu, Henry menyatakan para petani sudah tidak tertarik lagi menanam kedelai karena tidak adanya insentif bagi petani untuk menanam kedelai dan harga kedelai dipasar tidak bisa menutupi ongkos produksi. Menyangkut solusi gejala harga kedelai saat ini, memang harus segera diadakan operasi pasar untuk menurunkan dan menyetabilkan harga.

Namun secara jangka panjang kita harus berswasembada kedelai karena kedelai yang ada di pasar dunia tidak akan mencukupi kebutuhan Indonesia jikalau produksi nasional terus turun. Untuk mencapai swasembada itu ada tiga hal utama yang harus dilakukan pemerintah, pertama, segera melaksanakan

pembaruan agraria. Kedua, membangun infrastruktur di pedesaan seperti irigasi dan jalan-jalan desa bukan hanya jalan tol saja yang dibangun. Ketiga, tegakkan kedaulatan pangan dengan cara berswasembada dan melepaskan ketergantungan terhadap mekanisme pasar bebas.

Sementara itu, Henry menilai kenaikan harga kedelai di pasar dunia yang mencapai US\$ 600 per ton, diakibatkan oleh orientasi pembangunan yang salah. Isu biofuel yang digembar-gemborkan selama ini telah menyebabkan harga bahan baku seperti kedelai dan CPO meningkat karena permintaan industri pengolahan biofuel terhadap bahan-bahan pangan meningkat. Sementara itu, di Amerika Serikat sendiri para petani sudah beralih dari tanaman kedelai ke tanaman pemasok biofuel lainnya.

Di AS pada tahun 2007 terjadi penurunan luas penanaman kedelai dari 75,5 juta acre menjadi 63,7 acre atau turun 15% yang menyebabkan produksi kedelai turun sebesar 19%. Dan, Indonesia sendiri sangat tergantung pada AS, 70% kebutuhan kedelai nasional dipasok dari AS, Argentina dan Cina.

Mengenai kebijakan pemerintah menurunkan tarif impor kedelai sampai 0% pada hari ini, Henry berkeyakinan hal tersebut tidak akan membantu. "Saat ini harga kedelai naik hingga 200 persen lebih, mana mungkin dengan menurunkan tarif impor dari 10% menjadi 0% bisa efektif menurunkan harga," tandas Henry.

Sambungan dari hal. 6

semangat awal WSF) di tingkat nasional. Dengan ini, diharapkan inisiatif-inisiatif bisa datang dari gerakan rakyat dengan konteks yang lebih fokus. Isu-isu yang diusung pun bisa lebih mantap dicerminkan

melalui perjuangan rakyat yang sudah dilakukan selama ini, baik petani, buruh, nelayan, pemuda dan mahasiswa, gerakan perempuan, gerakan lingkungan dan gerakan anti-utang. Sementara solusi yang

ditawarkan bisa langsung mengena sesuai dengan konteks ekonomi-politik-sosial-budaya rakyat yang bersangkutan.

Kedaulatan pangan, jalan keluar krisis pangan Indonesia

Krisis pangan adalah masalah klasik bangsa ini, sebuah ironi bagi negara agraris yang tanahnya subur dan gemah ripah loh jinawi. Krisis pangan saat ini terjadi dimana kebutuhan pangan Indonesia telah tergantung kepada impor, dan harganya naik tak terkendali. Namun harus diperhatikan, bahwa krisis pangan yang terjadi di Indonesia bukanlah sebab yang akan berdampak pada hal lain (kemiskinan, pengangguran). Fenomena ini adalah sebuah akibat dari kebijakan dan praktek privatisasi, liberalisasi, dan deregulasi—sebagai inti dari Konsensus Washington.

Privatisasi; Akar dari masalah ini tidak hanya parsial pada aspek impor dan harga seperti yang sering didengungkan oleh pemerintah dan pers. Lebih besar dari itu, ternyata negara dan rakyat Indonesia tidak lagi punya kedaulatan, yakni kekuatan dalam mengatur produksi, distribusi dan konsumsi di sektor pangan. Saat ini di sektor pangan, kita telah tergantung oleh mekanisme pasar yang dikuasai oleh segelintir perusahaan raksasa.

Privatisasi sektor pangan—yang notabene merupakan kebutuhan pokok rakyat—tentunya tidak sesuai dengan mandat konstitusi RI, yang menyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Faktanya, Bulog dijadikan privat, dan industri hilir pangan hingga distribusi (ekspor-impor) dikuasai oleh perusahaan seperti Cargill dan Charoen Phokpand. Mayoritas rakyat Indonesia jika tidak bekerja menjadi kuli di sektor pangan, pasti menjadi konsumen atau end-user.

Privatisasi ini pun berdampak serius, sehingga berpotensi besar dikuasainya sektor pangan hanya oleh monopoli atau oligopoli (kartel)—seperti yang sudah terjadi saat ini.

Liberalisasi; krisis pangan juga disebabkan oleh kebijakan dan praktek yang menyerahkan urusan pangan kepada pasar (1998, Letter of Intent IMF), serta mekanisme perdagangan pertanian yang ditentukan oleh perdagangan bebas (1995, Agreement on Agriculture, WTO). Akibatnya negara dikooptasi menjadi antek perdagangan bebas. Negara ini pun melakukan upaya liberalisasi terhadap hal yang harusnya merupakan state obligation terhadap rakyat. Market access Indonesia dibuka lebar-lebar, bahkan hingga 0 persen seperti kedelai (1998, 2008) dan beras (1998). Sementara domestic subsidy untuk petani kita terus berkurang (tanah, irigasi, pupuk, bibit, teknologi dan insentif harga). Di sisi lain, export subsidi dari negara-negara overproduksi pangan seperti AS dan Uni Eropa—beserta perusahaan-perusahaannya—malah meningkat. Indonesia pun dibanjiri barang pangan murah, sehingga pasar dan harga domestik kita hancur (1995 hingga kini). Hal ini jelas membunuh petani kita.

Deregulasi; beberapa kebijakan sangat dipermudah untuk perusahaan besar yang mengalahkan pertanian rakyat. Seperti contoh UU No. 1/1967 tentang PMA, UU No. 4/2004 tentang Sumber Daya Air, Perpres 36 dan 65/2006, UU No. 18/2003 Tentang Perkebunan, dan yang termutakhir UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal. Dengan kemudahan regulasi ini, upaya privatisasi menuju monopoli atau kartel di sektor

pangan semakin terbuka. Hal ini semakin parah dengan tidak diupayakannya secara serius pembangunan koperasi-koperasi dan UKM dalam produksi, distribusi dan konsumsi di sektor pangan.

Dengan sistem kebijakan dan praktek ini, Indonesia kini tergantung kepada pasar internasional (harga dan tren komoditas). Maka saat terjadi perubahan pola-pola produksi-distribusi-konsumsi secara internasional, kita langsung terkena dampaknya. Kasus kedelai 2008 ini sebenarnya bukanlah yang pertama, karena ada kasus-kasus sebelumnya (beras pada tahun 1998, susu pada tahun 2007, dan minyak goreng pada tahun 2007). Hal ini akan sedikit banyak serupa pada beberapa komoditas pangan yang sangat vital bagi rakyat yang masih tergantung pada pasar internasional: beras, kedelai, jagung, gula, singkong dan minyak goreng.

Krisis pangan di awal tahun 2008 ini menunjukkan bahwasanya tesis tentang pasar bebas itu tidak berlaku untuk keselamatan umat manusia—terutama dalam hal pangan. Bahkan sejak aktifnya perdagangan bebas ini dipromosikan WTO, angka kelaparan di dunia semakin meningkat dari 800 juta jiwa (1996) menjadi 853 juta jiwa (2007).

Oleh karena itu, Serikat Petani Indonesia (SPI), dan di tingkat internasional La Via Campesina sudah dengan tegas menyatakan agar WTO keluar dari pertanian (1996-sekarang). Dan untuk jangka panjang, petani menuntut dilaksanakannya pembaruan agraria dalam rangka basis kebijakan agraria dan pertanian.

Dalam jangka pendek dan menengah, masalah krisis pangan

sebenarnya terkait dengan 3 hal—yakni (1) produksi pangan; (2) luasan lahan; dan (3) tata niaga pangan. Dengan memperhatikan ketiga hal tersebut, maka petani menuntut solusi jangka pendek kepada pemerintah:

1. Mematok harga dasar pangan yang menguntungkan petani dan konsumen. Harga tidak boleh tergantung kepada harga internasional karena tidak berkorelasi langsung dengan ongkos produksi dan keuntungan. Harga harus sesuai dengan ongkos produksi dan keuntungan petani dan kemampuan konsumen

2. Memberikan insentif harga kepada petani komoditas pangan (terutama beras, kedelai, jagung, singkong, gula dan minyak goreng) jika terjadi fluktuasi harga. Hal ini sebagai jaminan untuk tetap menggairahkan produksi pangan dalam negeri.

3. Mengatur kembali tata niaga pangan. Pangan harus dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Bulog bisa diberikan peran ini, tapi harus dengan intervensi yang kuat dari Departemen Pertanian, Departemen Perdagangan dan Departemen Keuangan.

4. Menambah produksi pangan secara terproyeksi dan berkesinambungan, dengan segera meredistribusikan tanah objek landreform yang bisa segera dipakai untuk pertanian pangan.

5. Menyediakan insentif bagi petani komoditas pangan, terutama bibit, pupuk, teknologi dan kepastian beli

6. Memberikan dukungan pelembagaan organisasi petani komoditas pangan, yakni kelompok tani, koperasi, dan ormas tani

Petani Warung Kiara mendesak BPN untuk memberikan hak tanah

15 orang perwakilan petani anggota SPI yang datang dari Sukabumi mengadakan klaim PT Sugih Mukti terhadap tanah yang telah digarap masyarakat di Kecamatan Warung Kiara, Sukabumi.

Para petani di Kecamatan Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi, lebih tepatnya lagi di Desa Bojong Kerta, Desa Sinar Jaya, Desa Warung Kiara dan Desa Hegar Manah telah menggarap lahan terlantar sejak tahun 1964. Luas lahan yang telah digarap sekitar 600 Ha dengan jumlah penggarap hingga sekarang 1060 kepala keluarga. Setelah menjadi tanah pertanian yang subur, PT Sugih Mukti datang dan mengklaim lahan tersebut sebagai bagian dari HGU mereka.

Luas lahan yang diklaim HGU PT. Sugih Mukti sekitar 753 Ha yang berlokasi antara desa Sirna Jaya dan Warung Kiara. pada tahun 1998 tercatat jumlah penggarap di atas lahan tersebut kurang lebih 715 KK

yang terdiri dari petani dari desa Bojong Kerta dan Sirna Jaya.

Tahun 1997 lahan yang ditanami oleh masyarakat dirusak oleh perkebunan dengan menggunakan traktor dan buldozer, kerugian masyarakat tidak diganti oleh perkebunan, petani tetap menggarap di lahan tersebut.

Masyarakat mengajukan kepemilikan lahan antara kurun waktu tahun 1998-1999 kepada Kecamatan Warung Kiara (1998), Pemda Sukabumi (Oktober 1999), Bina Graha (7 September 1999), BPN Sukabumi (4 Oktober 1999), Dinas Perkebunan, Gubernur, dll.

Petani mendapat keterangan dari Dinas Perkebunan bahwa HGU PT. Sugih Mukti akan berakhir pada 15 Mei 1998.

Sejak tahun 1990-sekarang di atas lahan tersebut telah dibangun fasilitas umum, baik oleh masyarakat sendiri ataupun oleh Pemda setempat.

Kondisi terakhir hingga tahun 2007,

perkebunan berencana akan melakukan penanaman karet kembali. Sedangkan masyarakat yang menggarap lahan akan diminta cukai hingga 30 persen dari penghasilan pertahunnya.

Mendesak BPN

Di kantor BPN, rombongan petani diterima Kasubdit Sengketa Kelompok Masyarakat dengan Badan Hukum, Mujiono. Ketua Departemen Hukum SPI, Agus Rully meminta BPN menyelesaikan konflik agraria di Warung Kiara. "Pemerintah harus menolak perusahaan yang mau memperpanjang HGU dengan mengklaim lahan warga yang sudah digarap sejak 1964 sebagai wujud dari pembaruan agraria yang dicetuskan sendiri oleh pemerintah lewat PPAN," ujar Rully.

Menanggapi hal itu, Mujiono berjanji akan menindaklanjuti kasus tersebut.



Tinjauan gerakan rakyat terhadap rencana kerja Bali

Laporan ke-4 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) beberapa bulan lalu memaparkan bahaya naiknya suhu permukaan bumi lima tahun mendatang. Diiringi dampak lanjutan berupa kegagalan panen, kelangkaan air, tenggelamnya daerah pesisir, lenyapnya spesies, banjir, dan kekeringan. Dalam beberapa dekade terakhir begitu banyak bencana alam yang melanda Indonesia dan dunia. Banjir, kekeringan dan topan badai silih berganti menimpa manusia dan alam ini.

Fenomena inilah kemudian disebutkan sebagai pemanasan global (global warming)—atau dalam beberapa pernyataan disebut juga sebagai perubahan iklim (climate change). Belum satu bulan berselang dari berakhirnya Konferensi Perubahan Iklim PBB di Bali pada

awal Desember lalu, Indonesia sudah merasakan efek langsung dari pemanasan global tersebut akibat banyaknya bencana alam terkait iklim yang melanda hampir seluruh pelosok negeri ini.

Hujan berkepanjangan dan iklim yang tak menentu sebulan terakhir menyebabkan banjir, tanah longsor dan gelombang pasang yang telah menghancurkan ratusan rumah, merenggut puluhan korban jiwa dan menenggelamkan sekitar 70 ribu hektar lahan pertanian. Dari jumlah lahan pertanian yang terendam banjir tersebut sebesar 56.034 hektar diantaranya merupakan lahan persawahan padi yang berakibat terancamnya persediaan pangan pokok nasional.

Lebih dari 10.000 pakar dan pemimpin negara menghadiri

Konferensi Perubahan Iklim selama dua minggu untuk mencari jalan keluar dari bencana ini, yang kini sedang melanda hampir seluruh penjuru dunia. Hal ini didorong oleh berkembangnya suatu kesadaran bahwa dampak sosial, ekonomi dan budaya dari pemanasan global tidak dapat dipandang ringan.

Pemanasan global sama seperti masalah lingkungan lain merupakan masalah ekonomi dan politik. Dalam konferensi ini terlihat jelas betapa berbagai kekuatan ekonomi dan politik saling bertarung mempertahankan kepentingan masing-masing sambil berusaha mencari jalan keluar dari pemanasan global yang efeknya sudah semakin dirasakan. Sehingga pada akhirnya sidang panjang selama dua minggu itu tidak menghasilkan strategi dan



resolusi tegas dan berguna yang dibutuhkan mengatasi pemanasan global dalam waktu dekat. Hasil akhir yang disebut sebagai Bali Action Plan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Memperkuat program strategis untuk pengembangan serta transfer teknologi yang ramah lingkungan, serta rendah emisi karbon yang dikelola melalui dana dari Global Environmental Facility (GEF) milik Bank Dunia.
- b. Memperkuat langkah-langkah adaptasi terhadap pemanasan global melalui penetapan dana adaptasi bagi negara dan kelompok yang rentan terhadap dampak pemanasan global, yang juga dikelola melalui GEF.
- c. Memperkuat langkah mitigasi dampak perubahan iklim melalui pengurangan dan pembatasan emisi gas rumah kaca bagi negara-negara maju dan pelaksanaan program pengurangan emisi dari deforestasi dan kerusakan hutan di negara-negara berkembang (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries-REDD).

Bahwa pemanasan global bukan merupakan sebab dari berbagai bencana yang ada namun merupakan akibat dari kesalahan model ekonomi global yang berkarakter neoliberal-kapitalistik nampaknya tidak disadari- atau sengaja dilupakan- oleh pihak-pihak yang bertemu dalam Konferensi ini. Bali Action Plan dipandang oleh gerakan rakyat Indonesia yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Lawan Neo-kolonialisme dan Imperialisme (GERAK LAWAN) tidak akan dapat mengatasi permasalahan ini dan membantu kelompok-kelompok yang paling rentan terhadap efek pemanasan global seperti petani, nelayan, miskin kota, dan kaum buruh.

Hasil akhir dari konferensi ini menunjukkan dominasi negara-negara maju yang tidak memiliki niatan sama sekali untuk mengubah model produksi, distribusi dan konsumsi mereka yang telah terbukti menghancurkan kehidupan di bumi ini. Demi melayani kepentingan negara-negara maju-Amerika Serikat, Jepang dan Kanada- yang sejak awal konferensi menolak adanya pengurangan emisi karbon secara spesifik karena hal tersebut akan sangat mempengaruhi perekonomian



mereka- negara-negara miskin dan berkembang lah yang akhirnya dituntut bertindak sebagai penyelamat bumi dengan menyediakan kawasan-kawasan penyerap karbon (Carbon Sink). Padahal nyata-nyata penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar yang menjadi penyebab pemanasan global ini adalah negara-negara maju. Dimana dalam kurun waktu tiga dekade terakhir menurut laporan IPCC telah terjadi peningkatan emisi karbon tahunan hingga 80 persen.

Praktek ekonomi neo liberal-kapitalistik terus dipertahankan, bahkan hingga kini ketika bumi sudah hampir kehabisan daya tahannya akibat eksploitasi berlebihan yang terus dilakukan demi keuntungan sebesar-besarnya bagi segelintir orang. Harapan tercapainya suatu keputusan yang tegas dari Konferensi Bali ternyata hanya

tinggal harapan. Oleh karena itu dipandang perlu dan mendesak bagi gerakan rakyat secara global khususnya di negara miskin dan berkembang yang selama ini menjadi korban untuk terus mendorong langkah alternatif pembangunan yang adil dan berkelanjutan secara sosial dan ekologis. Melaksanakan reforma agraria sebagai langkah strategis mengurangi meluasnya dampak pemanasan global, menghentikan praktek lembaga keuangan internasional yang melanggengkan praktek neo-kolonialisme, mengklaim utang ekologis kepada negara-negara industrialis lewat penghapusan utang, menjalankan kebijakan ekonomi nasional secara mandiri, melakukan penghematan energi dan tidak berperilaku boros dalam kehidupan sehari-hari.

Petani Damak Maliho, Deli Serdang diusir paksa dari lahan garapannya

PTPN IV Adolina, mengusir paksa petani anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) di Desa Damak Maliho, Kabupaten Deli Serdang. Pengusiran dilakukan oleh sekitar 35 Satuan Pengamanan Perkebunan dan dibantu oleh 70 aparat Dalmas Polres Deli Serdang dengan menggunakan Bulldoser pada hari Selasa (29/1) kemarin. Akibat penggusuran tersebut 30 hektar lahan garapan petani rusak dan 7 petani ditangkap walaupun kemudian dilepas kembali.

Penggusuran dilakukan karena PTPN IV Adolina berniat untuk menanam kelapa sawit diatas lahan sengketa yang masih digarap para petani. Hingga siaran pers ini dikeluarkan penggusuran dan penanaman oleh pihak PTPN IV masih berlangsung dengan pengawasan ketat aparat kepolisian. Bahkan menurut keterangan warga setempat, pihak perkebunan masih akan melakukan penggusuran lagi.

Lahan pertanian di Desa Damak Maliho merupakan lahan yang sudah lama disengketakan para petani setempat dengan Perusahaan Perkebunan. Petani di Desa Damak Maliho sebenarnya sudah menggarap lahan tersebut sejak tahun 1960. Pada

tahun 1972, muncul perusahaan perkebunan PT Sari Tugas yang mengambil alih lahan mereka. Atas dukungan penguasa Koramil Butepra yakni Kapten Kasmir Ali PT. Sari Tugas yang kini menjadi PTPN IV akhirnya bisa mengambil alih lahan warga.

Pasca Reformasi, petani Desa Damak Maliho mulai mempertanyakan kembali hak-hak mereka atas tanah tersebut. Karena tidak digubris pihak perusahaan, pada bulan Desember 2007, petani mereklaiming lahan tersebut dan mulai menanaminya dengan tanaman pangan yang sangat dibutuhkan warga.

Teror demi teror seringkali dirasakan petani penggarap. Bahkan 4 orang diantaranya pernah ditahan di Polres Deli Serdang hingga kurang lebih satu bulan lamanya. Meski demikian, petani Damak Maliho tetap bersikukuh atas lahan yang mereka garap. Hingga pengusiran paksa yang disertai kekerasan tersebut terjadi.

Ketua Departemen Hukum SPI, Agus Ruli Ardiansyah, menilai penggusuran tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi para petani. Apalagi penggusuran tersebut

disertai dengan intimidasi dan kekerasan. "Sungguh ironi, ketika terjadi krisis pangan di negeri ini, para petani tanaman pangan malah digusur dari lahan garapannya," ujar Dia.

Ruli mengkritik aparat kepolisian yang secara mambabi buta membela pihak PTPN IV. Bahkan, aparat dinilai telah menjadi kaki tangan pihak perusahaan perkebunan. "Seharusnya aparat menjadi pelindung masyarakat dan menjadi penengah yang adil, bukannya malah ikut-ikutan menggusur," jelas Dia.

Terakhir Ruli menghimbau agar pemerintah segera menyelesaikan sengketa agraria di Damak Maliho. "Dalam menyelesaikan konflik-konflik agraria, hendaknya semua pihak berpegangan kepada Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960 (UUPA 60). Pemerintah juga harus merealisasikan janjinya untuk meredistribusikan tanah kepada rakyat miskin seperti yang tercantum dalam Program Pembaruan Agraria (PPAN)," tegasnya.

Saat ini, pemerintah malah secara agresif memberikan konsesi-konsesi penguasaan tanah kepada perusahaan-perusahaan besar saja, sedangkan lahan-lahan rakyat malah digusur.

